



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025 Page 4112-4121

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pengaruh Kebijakan Kinerja Dinas Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Kota Bandung

Alifah Shafira^{1✉}, Resma Shapira², Salsa Febriana³, Neng Witska⁴, Andre Ariesmansyah⁵

Universitas Pasundan

Email: alifah.fira@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Pendidikan adalah kebutuhan esensial setiap individu yang terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, teknologi, dan budaya. Mutu pendidikan menjadi landasan untuk membentuk karakter generasi penerus yang siap menghadapi tantangan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengatur sistem pendidikan nasional untuk menjamin pemerataan kesempatan, peningkatan mutu, serta relevansi pendidikan. Di Kota Bandung, Dinas Pendidikan mempunyai peran vital dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan membentuk sumber daya manusia yang kompetitif. Kebijakan dan program peningkatan mutu pendidikan berfokus pada pengelolaan anggaran, pengembangan kurikulum, peningkatan kualitas guru, serta fasilitas belajar. Tantangan yang dihadapi termasuk ketidakcocokan antara keterampilan tenaga pendidik dan kebutuhan pekerjaan, yang dapat menghambat pencapaian tujuan pendidikan. Oleh karena itu, evaluasi dan perbaikan kebijakan diperlukan untuk menghasilkan pendidikan yang lebih baik.

Kata Kunci: *Kebijakan, Program Pendidikan*

Abstract

Education is an essential need for every individual who continues to adapt to the development of the times, technology, and culture. The quality of education is the foundation for forming the character of the next generation who are ready to face challenges. Law Number 20 of 2003 regulates the national education system to ensure equal opportunities, quality improvement, and relevance of education. In Bandung City, the Education Office has a vital role in improving the quality of education and forming competitive human resources. Policies and programs to improve the quality of education focus on budget management, curriculum development, improving teacher quality, and learning facilities. The challenges faced include the mismatch between the skills of educators and job needs, which can hinder the achievement of educational goals. Therefore, evaluation and improvement of policies are needed to produce better education.

Keywords: Policies, Programs Education

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan kebutuhan setiap individu dan terus berubah mengikuti perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi dan sosial budaya. Pendidikan diperlukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia setiap individu dan dianggap sangat penting. Mutu pendidikan merupakan landasan terpenting dalam mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan yang akan membentuk karakter penerus bangsa, yang siap menghadapi keadaan apapun. Menyadari betapa pentingnya pendidikan bagi kehidupan nasional dan kelangsungan kehidupan berbangsa, maka pemerintah (negara) berkewajiban menyelenggarakan proses pendidikan bagi warga negaranya dengan sebaik-baiknya.

Sistem pendidikan Indonesia diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 adalah "Sistem Pendidikan Nasional". Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, sistem pendidikan nasional harus menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, meningkatkan mutu, relevansi dan efisiensi pengelolaan pendidikan, serta harus mampu menjawab tuntutan perubahan sistem pendidikan untuk menghadapi tantangan. Mereformasi pendidikan secara terencana, tepat sasaran, dan berkelanjutan memerlukan penghidupan lokal, nasional, dan global. Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengatur bahwa pemerintah pusat dan daerah wajib memberikan pelayanan dan fasilitas serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Kota Bandung mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menjamin pendidikan yang berkualitas guna menghasilkan generasi yang berdaya saing di era globalisasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan yang

dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung mempunyai peranan yang strategis dalam mendukung berbagai program dan kegiatan peningkatan mutu pendidikan. Kebijakan kinerja di bidang pendidikan mencakup berbagai aspek, mulai dari pengelolaan anggaran pendidikan, pengembangan kurikulum, peningkatan kualitas guru, hingga optimalisasi fasilitas belajar mengajar. Namun keberhasilan kebijakan ini tidak hanya bergantung pada perencanaan yang matang tetapi juga pada implementasi yang efektif dan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, sekolah, guru, siswa, dan masyarakat.

Sebagai salah satu instansi pemerintah yang memegang peranan penting, Dinas Pendidikan Kota Bandung mempunyai tanggung jawab strategis untuk menyelenggarakan pendidikan dengan fokus pada pengembangan sumber daya manusia yang berbakat. Dinas Pendidikan Kota Bandung menjalankan perannya sesuai dengan pedoman berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung (PERWALI) Nomor 2. Nomor 1380 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Bandung. Organisasi mengharuskan karyawannya kompeten dan memahami praktik yang telah ditetapkan.

Sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem pendidikan, Dinas Pendidikan Kota Bandung memerlukan tenaga-tenaga yang mempunyai kualifikasi tinggi untuk menjawab tantangan dan dinamika perubahan di bidang pendidikan. Namun Dinas Pendidikan Kota Bandung menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan sumber daya manusia. Artinya kita mempunyai tenaga-tenaga yang keahliannya tidak sesuai dengan bidang pendidikannya. Kualitas pendidikan di Kota Bandung dapat diukur dari beberapa indikator, antara lain tingkat kelulusan, rata-rata nilai ujian, dan indeks kepuasan masyarakat. Departemen Pendidikan telah menetapkan sasaran kinerja yang jelas dalam rencana strategisnya, seperti meningkatkan tingkat kelulusan sebesar 100% dan meningkatkan rata-rata nilai ujian tahunan. Kementerian Pendidikan berupaya untuk terus meningkatkan dan memperkuat kinerjanya melalui kebijakan yang transparan dan responsif terhadap masyarakat. Upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui kebijakan kinerja, namun tantangan masih tetap ada. Pertama, sering kali tidak terdapat kesesuaian yang optimal antara keterampilan karyawan dan persyaratan pekerjaan. Hal ini dapat menghalangi tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penting bagi Dinas Pendidikan untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan dalam implementasi kebijakannya agar dapat mencapai hasil yang lebih baik dalam pendidikan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai didalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sebagai landasan teori dalam memahami pendekatan metode kualitatif berdasarkan pendapat Bogdan dan Moleong (2002, h. 03) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Deskriptif merupakan laporan yang berisi kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan. Data tersebut berasal dari naskah, wawancara, dan dokumen resmi lainnya.

Lokasi penelitian ini di Dinas Pendidikan Kota Bandung. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada 06 Januari 2025. Fokus dalam penelitian ini adalah: (1) Sistem Kepegawaian yang ada di Dinas Pendidikan Kota Bandung. (2) Kebijakan terkait pendidikan di Kota Bandung (3) Digitalisasi di Dinas Pendidikan Kota Bandung. *Sample* penelitian menggunakan *purposive sampling* dengan informan yaitu Ibu Icha sebagai kepala bagian kepegawaian. Teknik pengumpulan informasi yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Alat analisis yang digunakan saat penelitian yaitu alat tulis dan smartphone. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu penelitian dengan panduan wawancara (*interview guide*) dan catatan lapangan (*Field Note*). Metode analisis data menggunakan metode dengan model Interaktif menurut Miles dan Hubberman yang diterjemahkan Husani dan Purnomo (2009, h. 20). Analisis model interaktif ini melalui 3 tahap yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Serta untuk mengetahui kebenaran hasil penelitian perlu ditetapkan keabsahan atau (*dependability*) datanya, dalam penelitian ini dilakukan uji kredibilitas. Untuk menguji kredibilitas data/tingkat kepercayaan informasi tersebut, peneliti menggunakan cara observasi dan wawancara langsung dengan kepala bagian kepegawaian di Dinas Pendidikan Kota Bandung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Kepegawaian yang ada di Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan tujuan dan sasaran strategis suatu lembaga. Di dalam Pemerintahan Kota Bandung sudah di tetapkan indikator kinerja utama untuk tingkat pemerintahan daerah dan operasional di setiap daerah melalui

Keputusan Walikota Bandung Nomor: 060/Kep.497- Orpad/2019 tentang Indikator Kinerja Utama Bandung. Seluruh pegawai instansi pemerintah, baik itu pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dunia usaha, berbagai badan politik, organisasi pemerintah daerah dan perorangan harus mampu bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi.

Efisiensi kerja pegawai merupakan salah satu faktor yang memegang peranan penting dalam berbagai kegiatan organisasi dan harus diikuti secara ketat untuk mencapai tujuan organisasi yang tepat, sesuai jadwal yang telah ditentukan, target anggaran yang ditetapkan, dan lain-lain harus diperhatikan dan dikembangkan. tujuannya. Karyawan, melalui tindakan dan hasil mereka, merupakan faktor kunci dalam mencapai tujuan efisiensi organisasi.

Kompetensi merupakan salah satu faktor kunci dalam sumber daya manusia dan berpengaruh langsung terhadap kinerja pegawai. Kompetensi ini mencakup berbagai kegiatan pengembangan diri seperti pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan seminar yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, keterampilan, dan perilaku (sikap). Kompetensi sebagai kemampuan manusia yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap agar dapat berfungsi dengan baik dan sempurna (Edison et al., 2018). Inisiatif untuk meningkatkan kinerja karyawan tidak hanya berdampak positif terhadap kinerja organisasi tetapi juga membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik. Karyawan yang berkualifikasi tidak hanya mampu melaksanakan tugas sehari-harinya dengan lebih baik, tetapi mereka juga dapat berkontribusi secara signifikan dalam mencapai tujuan strategis organisasi. Oleh karena itu, fokus pada peningkatan kapabilitas pegawai merupakan strategi utama dalam rangka meningkatkan kinerja layanan pendidikan Kota Bandung dan meraih hasil yang lebih baik dalam layanan pendidikan. Karena jika seseorang memiliki kinerja yang bagus maka ia akan memiliki kemampuan yang bagus juga dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Suharsaputara (2010) bahwa kesesuaian antara kemampuan karyawan dengan tuntutan pekerjaan akan memberikan pengaruh yang positif terhadap kinerja individu dan organisasi. Ketika seorang karyawan memiliki tingkat kompetensi yang tinggi, kinerjanya cenderung memberikan hasil yang diinginkan dan meningkatkan kemampuannya untuk berhasil menyelesaikan tugas, mengambil keputusan yang tepat, dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan kerja.

Robbins. (2014) menyatakan bahwa "produktivitas adalah suatu indikator kinerja yang akan menghasilkan efisiensi dan efektivitas." Artinya produktivitas setiap karyawan

dapat dinilai dan diukur sesuai dengan rentang kinerja dan tujuan yang ditetapkan untuk setiap karyawan oleh organisasi. Dinas Pendidikan Kota Bandung mempunyai kategori penilaian prestasi kerja sebanyak pegawai. Prestasi kerja optimal dikatakan tercapai bila seorang karyawan mencapai tujuan toleransi 85% atau lebih. Salah satu cara untuk mengoptimalkan produktivitas Dinas Pendidikan Kota Bandung adalah dengan mengadopsi dan menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001: 2015 dan memperoleh sertifikasi ISO 9001: 2015. Terus dikembangkan untuk meningkatkan produktivitas kerja.

Kebijakan terkait Pendidikan di Kota Bandung

Pemerintah Kota Bandung telah menerapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menjamin pemerataan akses bagi seluruh warga negara. Situasi pendidikan di Kota Bandung menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara prestasi akademik siswa, kapasitas guru, dan prasarana sekolah. Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas guru dan infrastruktur yang memadai memberikan kontribusi positif terhadap hasil belajar siswa. Kompetensi guru yang tinggi berdampak positif terhadap hasil belajar siswa.

Kompetensi Guru Menurut Muzenda, Alexander (2013: 6), kompetensi guru dalam proses belajar mengajar terdiri dari pengetahuan, keterampilan komunikasi, penguasaan materi pelajaran, kehadiran di kelas, keterampilan mengajar, dan berbagai faktor guru yang saling berkaitan. Ini adalah konsep multidimensi yang mengukur berbagai aspek sikap. Dimensi Kompetensi Guru Menurut Syaiful Bahri Djamarah (2011: 177), pencapaian hasil belajar berupa perubahan memerlukan proses tertentu yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal individu. Faktor internal meliputi faktor fisiologis (kondisi fisiologis dan keadaan panca indera) dan faktor psikologis (minat, kecerdasan, bakat, motivasi, dan kemampuan kognitif). Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor lingkungan (alam, sosial budaya) dan faktor instrumental (kurikulum, program, guru, alat, fasilitas).

Dinas Pendidikan Kota Bandung memiliki kebijakan terkait PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru). Sejak Tahun Pelajaran 2017/2018 Kota Bandung telah menerapkan sistem penerimaan peserta didik baru berdasarkan sistem zonasi, radius dan jarak, namun belum mencapai 100 persen. Melalui sistem zonasi ini, seluruh warga Kota Bandung diharapkan memiliki akses pendidikan yang dekat dengan tempat tinggalnya. Menurut Dinas Pendidikan Kota Bandung, manfaat sistem zonasi ini adalah pemerataan pendidikan, penghematan waktu karena dekat dengan sekolah, berkurangnya biaya transportasi, peningkatan kebugaran jasmani siswa, dan berkurangnya kemacetan lalu lintas. Namun

selalu terdapat kontradiksi dalam penerapan pedoman PPDB di Kota Bandung. Dinas Pendidikan Kota Bandung membagi menjadi beberapa kelompok sekolah yaitu :

1. Kelompok A : sekolah ini berada di tengah-tengah area pemukiman, kelompok A ini berada pada pembatasan zonasi 90%, dan merupakan bagian dari kelompok Tren Kelanjutan Pendidikan (RMP) , yang sebelumnya dikenal sebagai Siswa Miskin. Kelompok A terdiri dari 36. sekolah.
2. Kelompok B : mencakup sekolah yang berlokasi di dalam kota tetapi di kawasan perkantoran dan karena itu jauh dari kawasan pemukiman. Sekolah kelompok B berada pada peraturan zonasi bertahap, yaitu zonasi 50% dan 40%. Terdapat 5 sekolah yang berada di dalam kelompok B.
3. Kelompok C : untuk kelompok C berlaku peraturan zona perbatasan yang rtinya, 80% berada di dalam wilayah metropolitan Bandung dan 10% di luar wilayah metropolitan Bandung. Terdapat 16 sekolah yang masuk dalam kelompok C.

Tertulis di dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor : 20 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kota Bandung. Di dalam peraturan ini berisi hal-hal yang menyangkut tentang pendidikan seperti Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan, Peserta Didik, Penyelenggaraan Pendidikan Persekolahan, Kurikulum, dan lain sebagainya.

Terdapat pula Peraturan Walikota Bandung NOMOR : 411 TAHUN 2010 Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Bandung. Di dalamnya berisi perihal Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja, Kelompok Jabatan Fungsional, dan lain sebagainya.

Digitalisasi di Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Digitalisasi dalam dunia pendidikan merupakan langkah strategis untuk menjawab tantangan era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0. Dinas Pendidikan Kota Bandung telah mengambil langkah penting dalam penerapan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pendidikan, efisiensi operasional dan keterjangkauan informasi bagi seluruh pemangku kepentingan. Salah satu inisiatif digitalisasi yang paling menonjol adalah pengenalan Sikaya (Sistem Informasi Kelas Virtual). Sikaya adalah platform pembelajaran online yang memungkinkan interaksi digital antara guru dan siswa. Aplikasi ini menggunakan sistem single sign-on (SSO) yang terintegrasi dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), sehingga pengguna dapat mengakses informasi tanpa harus memasukkan detail sekolah secara manual. Integrasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, namun juga menjamin keakuratan data yang digunakan oleh sekolah dan

pemerintah. Selain itu, Dinas Pendidikan Kota Bandung juga meluncurkan aplikasi Sipuber (Sistem Informasi Pembelajaran Berbasis Digital) yang menyediakan modul pembelajaran dan bahan ajar secara online. Sipuber dimaksudkan untuk mendukung pembelajaran baik secara tatap muka maupun daring.

Untuk mendukung penerapan teknologi tersebut, Dinas Pendidikan Kota Bandung telah menyelenggarakan Petunjuk Teknis Digitalisasi Pendidikan (Bimtek). Tujuan dari Bimtek ini adalah:

1. Membantu untuk meningkatkan kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi digital.
2. Membantu memahami cara menggunakan aplikasi Sikaya dan Sipuber.
3. Mengoptimalkan penggunaan infrastruktur teknologi informasi yang ada.

Adapun contoh penerapan digitalisasi di sekolah selain aplikasi Sikaya dan Sipuber, yaitu Sistem Manajemen Sekolah Berbasis Unggulan (SMSBK) yang diterapkan oleh SD El Fitra. SMSBK membantu meningkatkan kualitas manajemen sekolah dengan memfasilitasi pemantauan pekerjaan guru, pengendalian manajemen, dan proses pelaporan yang lebih cepat. Sistem ini menunjukkan bagaimana digitalisasi dapat mengoptimalkan pengelolaan sekolah baik dari aspek akademik maupun non akademik.

Digitalisasi tidak hanya diterapkan dalam hal teknologi, tetapi juga dalam penguatan pendidikan karakter. Di era digital, media pembelajaran yang inovatif memberikan peluang besar untuk memperkuat nilai-nilai karakter siswa. Berikut ini adalah beberapa langkah konkrit yang telah diambil sejauh ini :

1. Integrasi nilai-nilai kepribadian ke dalam konten digital, seperti nilai-nilai agama, moralitas, kejujuran, tanggung jawab, dan kebangsaan diintegrasikan ke dalam materi pembelajaran digital. Misalnya melalui video edukasi yang mengandung pesan moral dan cerita interaktif yang membangun empati.
2. Pemanfaatan aplikasi untuk memperkuat kepribadian: Aplikasi pembelajaran berbasis permainan edukatif digunakan untuk menanamkan nilai-nilai positif. Contohnya mencakup simulasi yang melibatkan pengambilan keputusan berbasis moralitas dan pemecahan masalah yang mengomunikasikan pentingnya kolaborasi.
3. Pembelajaran Berbasis Proyek Digital : Siswa diminta untuk bekerja dalam tim pada proyek digital, seperti membuat kampanye kesadaran lingkungan atau mengembangkan aplikasi sederhana. Proyek ini mengajarkan nilai-nilai kolaborasi, kreativitas, dan tanggung jawab.

Tantangan dan Solusi Digitalisasi Pendidikan di Kota Bandung meskipun hadirnya digitalisasi memiliki banyak manfaat, namun juga membawa tantangan, seperti : Kesenjangan infrastruktur karena tidak semua sekolah di Kota Bandung memiliki akses internet yang memadai atau peralatan teknologi yang memadai. Selain itu, tingkat kompetensi digital beberapa guru dan siswa perlu ditingkatkan lebih lanjut untuk memastikan penggunaan teknologi yang optimal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Dinas Pendidikan Kota Bandung bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pihak swasta, memberikan akses internet gratis di lingkungan sekolah dan pelatihan teknis kepada guru dan tenaga kependidikan.

SIMPULAN

Pendidikan adalah kebutuhan penting bagi setiap orang yang terus berubah seiring perkembangan zaman, teknologi, dan budaya. Mutu pendidikan menjadi dasar untuk membentuk karakter generasi penerus. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengatur sistem pendidikan nasional untuk menjamin pemerataan dan peningkatan mutu. Dinas Pendidikan di Kota Bandung berperan penting dalam meningkatkan kualitas dan membentuk sumber daya manusia. Kebijakan dan program fokus pada pengelolaan anggaran, kurikulum, kualitas guru, dan fasilitas. Tantangan yang ada termasuk ketidakcocokan antara keterampilan tenaga pendidik dan kebutuhan pekerjaan, sehingga evaluasi dan perbaikan kebijakan diperlukan.

Sistem Kepegawaian di Dinas Pendidikan Kota Bandung memiliki indikator kinerja utama untuk menilai keberhasilan tujuan dan sasaran strategis. Seluruh pegawai instansi pemerintah harus bekerja efektif dan efisien. Pemerintah Kota Bandung juga menerapkan kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pemerataan akses. Dinas Pendidikan Kota Bandung membagi menjadi 3 kelompok dalam pembagian wilayah PPDB.

Digitalisasi di Dinas Pendidikan Kota Bandung adalah langkah penting menghadapi Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0. Mereka memperkenalkan Sikaya, platform pembelajaran online untuk interaksi guru dan siswa. Digitalisasi tidak hanya diterapkan dalam hal teknologi, tetapi juga dalam penguatan pendidikan karakter. Di era digital, media pembelajaran yang inovatif memberikan peluang besar untuk memperkuat nilai-nilai karakter siswa.

DAFTAR PUSTAKA

- HARYAT, W. S. (2024). PERAN DIGITALISASI SEKOLAH TERHADAP MUTU PENDIDIKAN. Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran.
- Hikmah, N. (2018). Pengaruh Kompetensi Guru dan Pengetahuan Awal Siswa terhadap Motivasi . INDONESIA JOURNAL OF ECONOMICS EDUCATION.
- Ius Rusnati, A. K. (2022). PERSEPSI KEPALA SEKOLAH TERHADAP SISTEM DIGITALISASI PENGELOLAAN SEKOLAH DASAR DI SD EL FITRA. Jurnal Al-Burhan .
- Karmila, M. (2020). ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN SISTEM ZONASI DALAM . Jurnal Mappesona .
- Nugraha, M. A. (2024). Strategi Penguatan Pendidikan Karakter Era Digitalisasi di Sekolah. Jurnal Pendidikan Karakter .
- Nuriansyah, F. (2024). EFEK MEDIASI LITERASI DIGITAL PADA PENGARUH KOMPETENSI . Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi.
- Tyas, R. Y. (2024). Pengaruh kompetensi pegawai terhadap kinerja pegawai di dinas pendidikan kota Bandung. Jurnal Tata Kelola Pendidikan , 80-81.
- Widiastuti, I. (2017). PENGARUH KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG. Jurnal Ilmiah WIDYA.